

REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK **UNTUK** **KESEJAHTERAAN RAKYAT**

REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN ASN

ORIENTASI KEPEMIMPINAN BAGI KEPALA DAERAH
Magelang, 24 Februari 2025

OUTLINE

1

KONTEKS DAN ARAHAN PRESIDEN

2

PERJALANAN REFORMASI BIROKRASI DAN CAPAIAN SAAT INI

3

ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

4

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REFORMASI BIROKRASI

5

MANAJEMEN ASN SEBAGAI PILAR REFORMASI BIROKRASI

6

TINDAK LANJUT DAN PENUTUP

The slide features decorative geometric patterns in the top-left and bottom-right corners. These patterns consist of various shapes like squares, circles, and lines, some filled with colors like blue and light blue, and others with patterns like dots or stripes. The patterns are arranged in a way that they appear to be part of a larger, repeating design.

KONTEKS DAN ARAHAN PRESIDEN

BIROKRASI

MERUPAKAN

MESIN PEMBANGUNAN

(ENGINES FOR DEVELOPMENT)

Birokrasi merupakan mesin pembangunan dari sebuah kendaraan pemerintahan, dengan Kepala Negara/Daerah sebagai pengemudi

Tugas Kepala Daerah

Mengemudikan (memimpin) birokrasi daerah untuk mencapai tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat

Seperti kendaraan yang memiliki berbagai indikator (kecepatan, bahan bakar, elektrik, dll), “kendaraan” pemerintahan juga memiliki berbagai indikator pembangunan, antara lain:

- Indeks Pelayanan Publik (IPP)
- Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

REFORMASI BIROKRASI bukan tentang administrasi, melainkan transformasi pemerintahan secara menyeluruh

REFORMASI BIROKRASI

Upaya **perbaiki sistem pemerintahan** agar lebih **efektif dan efisien** sehingga mampu **melayani masyarakat dan mencapai target pembangunan** dengan optimal



**Tantangan
Pembangunan**



Kelembagaan



Proses Bisnis



SDM Aparatur (ASN)



Manajemen Kinerja



Pelayanan Publik



Transformasi Digital Pemerintah

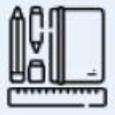


**Tujuan dan Target
Pembangunan**

Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait

Reformasi Birokrasi



 <p>Responsivitas Birokrasi</p> <p>Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat</p>	 <p>Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran</p> <p>Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di kalangan birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran</p>
 <p>Percepatan Implementasi Kebijakan</p> <p>Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif</p>	 <p>Pengelolaan ASN</p> <p>Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi</p>
 <p>Penguatan Koordinasi Antarlembaga</p> <p>Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan swasembada pangan serta energi.</p>	 <p>Pelayanan Berbasis Teknologi</p> <p>Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyebaran pendidikan dan akses ke layanan dasar</p>
 <p>Efektivitas Alokasi Anggaran</p> <p>Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat</p>	 <p>Reformasi Pelayanan Publik</p> <p>Pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat</p>

Sumber: Asta Cita Presiden, Sidang Kabinet Paripurna 23 Oktober 2024

KEPADA KEPALA DAERAH

“Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela & menjaga kepentingan rakyat kita.

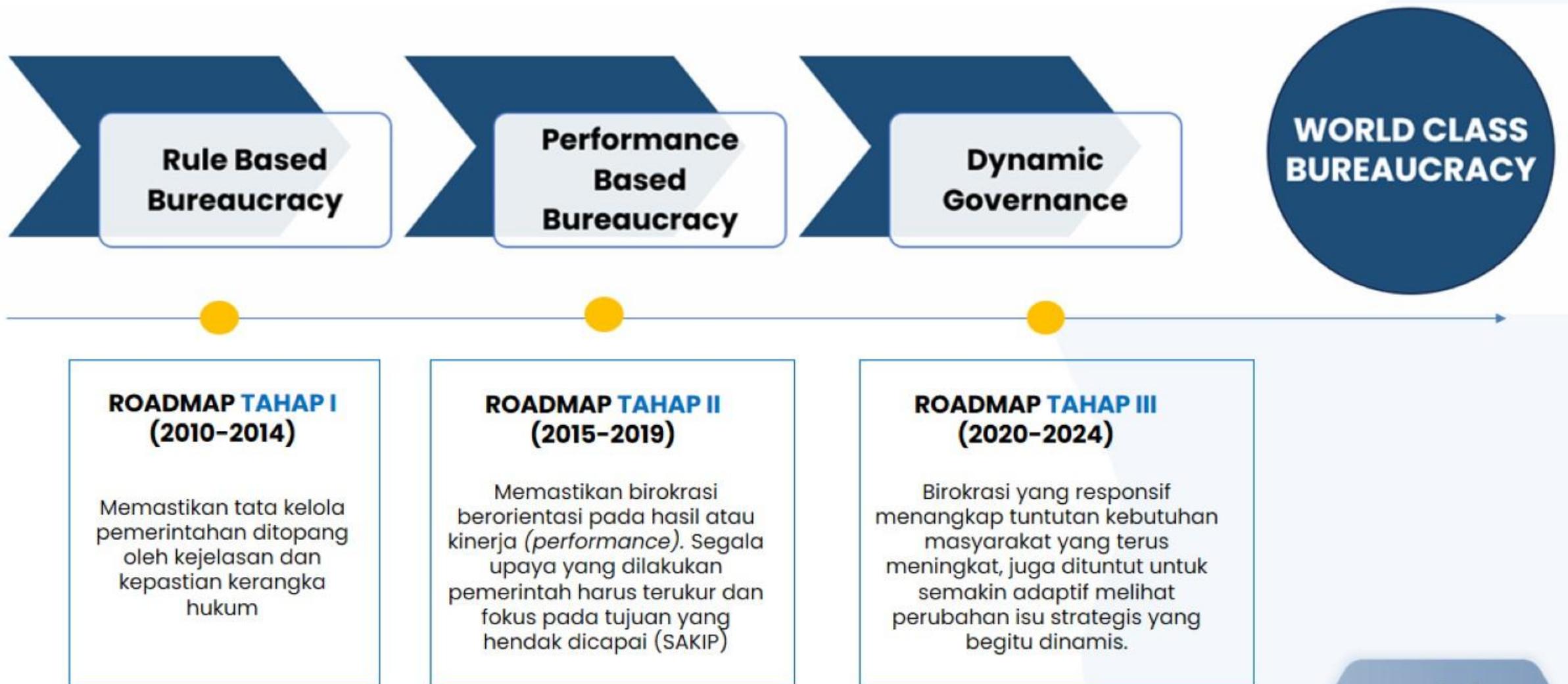
Saudara harus berjuang untuk memperbaiki kehidupan mereka.”

Disampaikan Pada Pelantikan Kepala Daerah
20 Februari 2025



PERJALANAN REFORMASI BIROKRASI DAN CAPAIAN SAAT INI

AWAL MULA UPAYA REFORMASI DI INDONESIA: GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (GDRBN) TAHUN 2010 – 2025



POTRET BIROKRASI INDONESIA DI PANGGUNG REGIONAL DAN GLOBAL

Meski belum menjadi yang terbaik di ASEAN, Indonesia telah dan akan terus dapat meningkatkan kualitas birokrasi di panggung global, dalam rangka meningkatkan **daya saing internasional**.

Indeks Efektivitas Pemerintah (2022)
Government Effectiveness Index



Dari 214 negara | Sumber: World Bank

Indeks Kualitas Regulasi (2023)
Regulatory Quality



Dari 266 negara | Sumber: World Bank

Indeks Kemudahan Berusaha (2024)
Business Enabling Environment (Business Ready)



Dari 50 negara | Sumber: World Bank

Indeks Inovasi Pemerintahan (2024)
Government Innovations Index



Dari 113 negara | Sumber: World Intellectual Property Organization

Indeks Pembangunan Pemerintah Digital (2024)
Electronic Government Development Index (EGDI)



Dari 193 negara | Sumber: United Nations

SEBARAN INDEKS RB TAHUN 2023 PER PROVINSI DI INDONESIA



- Seluruh (100%) Pemda di provinsi tersebut memperoleh Indeks RB minimal Baik
- Sebagian besar (90-99%) Pemda di provinsi tersebut memperoleh Indeks RB minimal Baik.
- Mayoritas (76-89%) Pemda di provinsi tersebut memperoleh Indeks RB minimal Baik.
- Sebagian kecil (50-75%) Pemda di provinsi tersebut memperoleh Indeks RB minimal Baik.
- Kurang dari 50% Pemda di provinsi tersebut memperoleh Indeks RB minimal Baik.



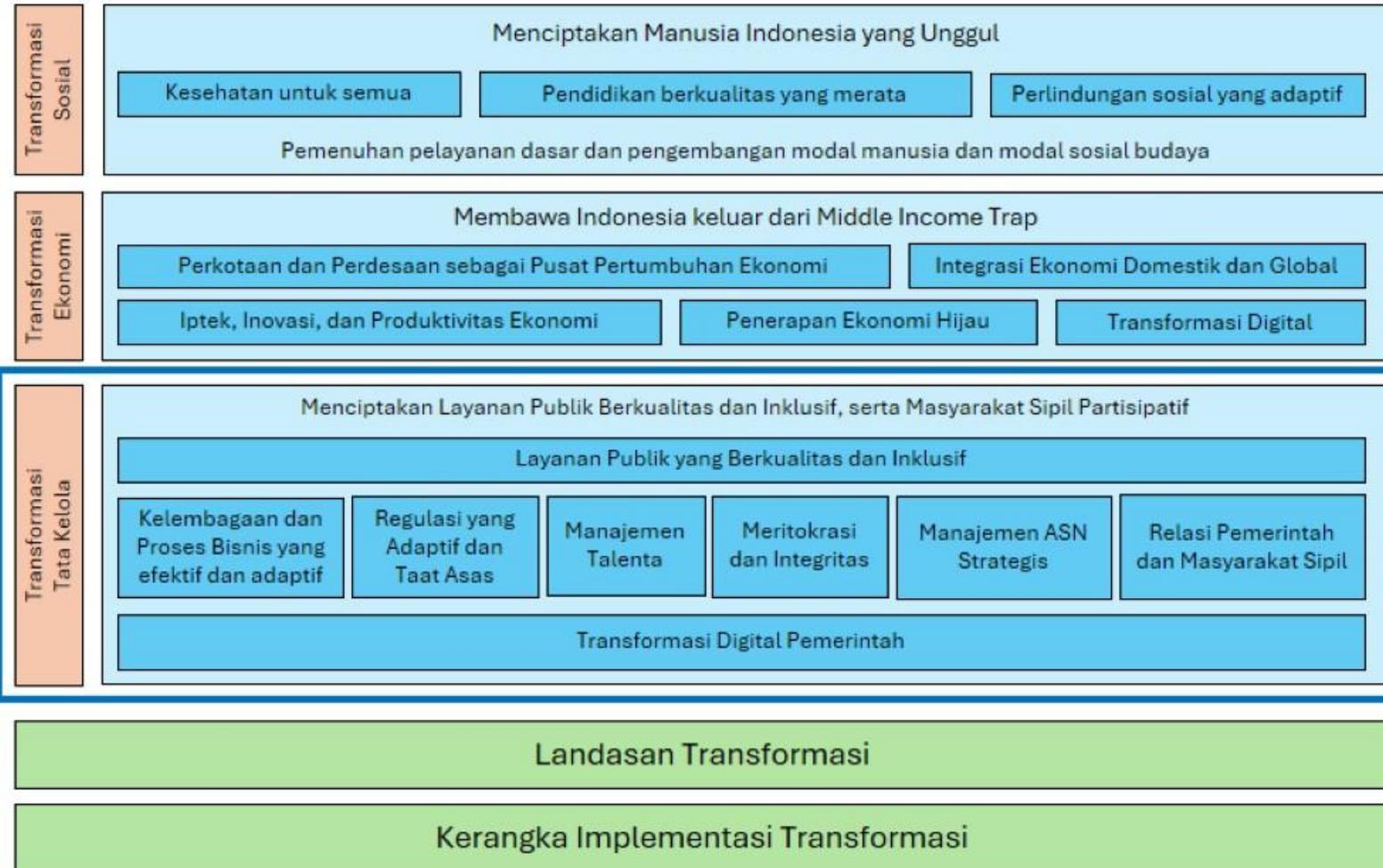
ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Transformasi Indonesia

untuk Mencapai Tujuan Pembangunan

Disarikan dari UU 59/2024
RPJP Nasional 2025 - 2045

Indonesia Emas 2045



Transformasi Tata Kelola sebagai penopang Transformasi Indonesia merupakan amanat pelaksanaan UU No 59 Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Indonesia Emas 2045 dicapai dengan perwujudan Transformasi Sosial melalui peningkatan Transformasi Ekonomi yang ditopang oleh Transformasi Tata Kelola.

Arah pembangunan Transformasi Tata Kelola: **Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.**

Terdiri dari:

1. Layanan pemerintah
2. Kelembagaan yang efektif
3. Proses bisnis yang adaptif
4. Manajemen talenta
5. Meritokrasi dan integritas
6. Manajemen ASN strategis
7. Relasi pemerintah dan masyarakat sipil
8. Transformasi digital pemerintah

Visi

World Class Bureaucracy 2045

Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia untuk
Mendukung Visi Indonesia EMAS 2045

Misi

1. Meningkatkan Kolaborasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional
2. Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi untuk Mengatasi dan Mengantisipasi Tantangan Global (global megatrend)
3. Mewujudkan Budaya Birokrasi yang Berintegritas dan Melayani untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat

Tujuan

Terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (human-based) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan & berkelanjutan
Indikator: 1. Government Effectiveness; 2. Corruption Perception Index; 3. Public Service Inclusiveness; 4. E-Government Development Index; 5. Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran

2. Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit
3. Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif
4. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah
5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif

1. Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah

Dicapai dengan tahapan:

Tahap 1



Digital
Governance

2025-2029

Tahap 2



Whole
Governance

2030-2034

Tahap 3



Platform
Governance

2035-2039

Tahap 4

2045

Human - Based
Governance

2040-2045

**Menuju
Human-
Based
Governance**

KETERKAITAN ASTACITA, RPJMN DAN ROADMAP RB

Asta Cita Pemerintah Kabinet Merah Putih



Misi Asta Cita Ke-7:
Memperkuat **reformasi** politik, hukum, dan **birokrasi**, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

- 32 Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
* SPBE, SDI, & GOVTECH
- 42 Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH.
* Program Zona Integritas: Membangun budaya anti korupsi dan pelayanan prima pada unit-unit strategis
- 45 Menyusun Birokrasi yang berdasarkan atas strategi pembangunan dan menerapkan manajemen kinerja ASN.
* Manajemen ASN
- 47 Meningkatkan sinergi antar-lembaga birokrasi dan antar daerah
* Kebijakan Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKP) dan Proses Bisnis Tematik: Manajemen Kinerja lintas K/L/D
- 49 Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan
* SPBE, SDI, GOVTECH, MPP, Zona Integritas
- 50 Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN terbaik
* Manajemen Talenta ASN

8 Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025 – 2029

- 1 **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)**
- 2 **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru**
- 3 **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**
- 4 **Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**
- 5 **Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri**
- 6 **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**
- 7 **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan**
- 8 **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan makmur**

Target Capaian ROADMAP RB 2025-2029*

Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah

- Terbentuknya kebijakan nasional Pemerintah Digital dan Transformasi Digital Nasional, diselaraskan dengan perkembangan terkini di dunia dan kemajuan teknologi.
- Peningkatan kapabilitas dan budaya ASN Digital.
- Penguatan kelembagaan dan tata laksana lintas instansi pemerintah pada KLU/D dalam pelaksanaan transformasi digital.
- Transformasi layanan pemerintah pada K/L melalui pemanfaatan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang berorientasi kemudahan pengguna (user centric).
- Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial pada layanan strategis pemerintah.
- Terbentuknya Lembaga publik pelaksana percepatan transformasi digital pemerintah
- Pencapaian peringkat 50 EGGI

Terciptanya Aparatur Negara yang Berkinerja Tinggi Berdasarkan Sistem Merit

- Perencanaan, pengadaan, dan pengembangan kompetensi ASN untuk critical jobs dan prioritas pembangunan
- Akselerasi penerapan manajemen talenta
- Pengembangan pola karir Jabatan Fungsional
- Pengembangan Job Attractiveness, Total Reward dan Employer Branding
- Pengembangan platform digital yang mendukung manajemen ASN sesuai prinsip merit

Terbangunnya perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif

- Pengembangan sistem integritas dan pengawasan
- Pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan
- Perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa
- Penanaman core values ASN
- Komitmen implementasi kebijakan dan ita tuas putusan peradilan

Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah

- Mengintegrasikan perencanaan pembangunan, manajemen kinerja dan manajemen risiko
- Membangun struktur dan mekanisme kerja shared-outcome berbasis kolaborasi dan jejaring
- Melakukan capability review untuk pencapaian kinerja organisasi
- Optimalisasi pengelolaan dan penggunaan aset

Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif

- Perbaikan ekosistem evidence-based policy
- Pengembangan layanan berbasiskan life-event dan omnichannel
- Pengembangan co-design public services
- Perluasan inklusivitas layanan publik
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Peningkatan kepatuhan terhadap standar layanan publik

*proses penetapan masih berlangsung



RB Penanggulangan Kemiskinan



Penguatan Tata Kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan siklus hidup kepada masyarakat

Cara kerja kolaboratif dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan.

RB Peningkatan Investasi



Penguatan Tata Kelola birokrasi agar terjadi penyederhanaan proses bisnis layanan berusaha dan kemudahan layanan publik untuk dunia usaha

Dukungan terhadap kemudahan daya tarik investasi.

RB Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi



Penguatan Tata Kelola birokrasi agar terjadi efektivitas penerimaan negara dan efisiensi belanja publik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Dukungan terhadap nilai tambah ekonomi dan penerimaan negara

RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden



Penguatan tata kelola birokrasi terhadap Program Prioritas Presiden agar terjadi kolaborasi dan sinergitas yang cepat, tepat, dan terpadu dari seluruh K/L/Pemda untuk mendukung prioritas Presiden

Contoh: Swasembada pangan, energi, air dan ekonomi; Makan Bergizi Gratis.

RB Transformasi Digital Pemerintah

Transformasi digital pemerintah berbasis arsitektur pemerintah digital menjadi salah satu pilar Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi Masyarakat, dengan prioritas utama: 1. layanan digital siklus hidup, 2. penerimaan negara, 3. layanan berusaha, dan 4. belanja publik

REFORMASI BIROKRASI AKAN DIRASAKAN MASYARAKAT APABILA

TANTANGAN KEMUDAHAN LAYANAN DAPAT DISELESAIKAN



KONDISI SAAT INI



Masyarakat harus mengakses berbagai aplikasi/mengunjungi berbagai lokasi satker



Proses layanan yang masih kompleks, panjang & tidak transparan



Kebutuhan "**fotocopy** KTP/dokumen" untuk mendapatkan layanan



Pengisian data yang berulang kali untuk mengakses layanan



KONDISI SEHARUSNYA



Layanan terpadu di 1 Portal digital, maupun berbagai lokasi fisik yang mudah dijangkau (mini-MPP)



Proses yang **simpel, cepat, mudah, & transparan** (*User centric*)



Tidak perlu **fotocopy** KTP/dokumen, cukup gunakan identitas digital atau **biometrik** (*fingerprint/face recognition*)



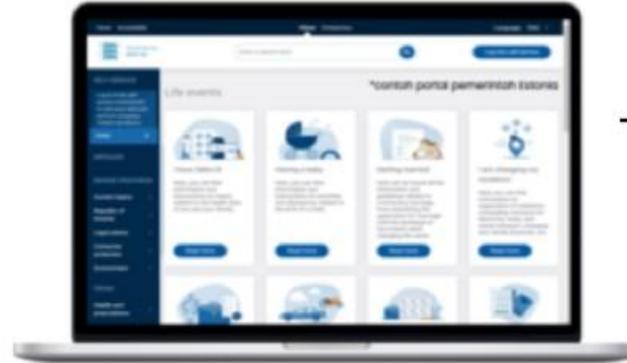
Satu kali isi data untuk berbagai layanan (*Once-only principle*)

Fokus ke kebutuhan masyarakat, bukan kewenangan instansi.

Menu di portal layanan publik sangat jelas dan praktis:

- layanan apabila sakit,
- layanan untuk menikah,
- langkah mengganti alamat,
- layanan apabila di PHK,
- dsb

**PRAKTIK BAIK INTERNASIONAL
PORTAL LAYANAN PUBLIK ESTONIA**



**NEGARA HADIR KAPAN
PUN, DI MANA PUN**

**CEPAT
MUDAH
MURAH**

Transformasi masif layanan negara dengan teknologi digital.

**Pemerintah perlu mewujudkan layanan yang berorientasi pengguna (*user centric*)
Proaktif, personal, dan terpadu, dari lahir sampai meninggal (siklus hidup)**

***Ilustrasi**



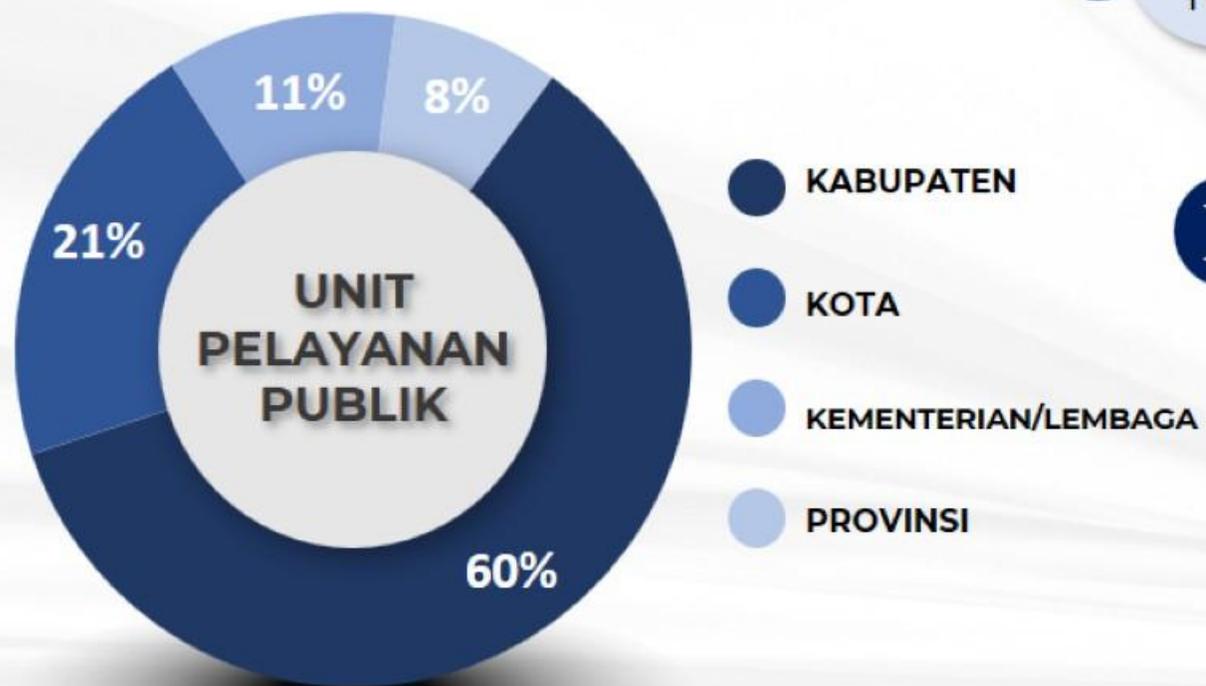


PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REFORMASI BIROKRASI

URGENSI PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH

Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik yang merupakan cerminan kualitas birokrasi di mata masyarakat.

PERSENTASE SEBARAN UNIT PELAYANAN PUBLIK



Pemerintah Daerah sebagai pemberi layanan publik terdekat dan terbanyak ke masyarakat



Meningkatnya kesadaran dan tuntutan publik atas kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas di daerah



Kondisi politik dan pemerintahan akan stabil jika pelayanan publik sesuai dengan ekspektasi rakyat

KEPALA DAERAH MERUPAKAN PEMIMPIN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI KUNCI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL

Kepala daerah merupakan pemimpin birokrasi di daerah untuk terus meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.



VISIONING

Menciptakan visi, membuat pemahaman yang sama akan tujuan dari reformasi birokrasi



STRUCTURING

Mengatur dan merancang reformasi birokrasi secara menyeluruh (kebijakan, SDM, anggaran, dll)



INTEGRATING

Menciptakan keterpaduan dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi; membangun kerjasama antar perangkat daerah, komitmen pegawai dan budaya kerja yang positif.



MONITORING

Pemantauan dan memastikan bahwa agenda reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana.

Disarikan dari: Ford et al, 2021

Dampak kesuksesan Kepala Daerah dalam Reformasi Birokrasi



Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Ekonomi yang terus tumbuh bersama dengan pemerataan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat



Pelayanan Publik yang Berkualitas

Kualitas pelayanan kepada masyarakat akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Stabilitas Politik dan Sosial

Stabilitas politik dan sosial akan mempermudah pengembangan bisnis dan meningkatkan kepuasan rakyat

Regulasi yang Efektif dan Jelas

Regulasi yang tidak berbelit dan jaminan kejelasan dalam perizinan akan mempermudah investasi

Sinergi Pusat dan Daerah

Keterhubungan program dan kolaborasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah akan berdampak pada pencapaian pembangunan yang optimal.



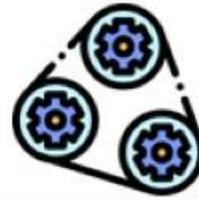


MANAJEMEN ASN SEBAGAI PILAR REFORMASI BIROKRASI

Kesuksesan Pencapaian Pembangunan Bergantung pada SDM ASN Unggul



Birokrasi yang profesional adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah



ASN menjadi penggerak birokrasi, mendorong transformasi dan inovasi dalam pembangunan



Manajemen ASN mendukung tujuan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik dan pencapaian target pembangunan



ARAH TRANSFORMASI MANAJEMEN ASN (BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2023)

Pelayanan Publik yang lebih baik dan
Masyarakat yang lebih sejahtera

Outcome

Birokrasi yang profesional dan
berkelembagaan dunia

Indeks Persepsi Korupsi yang
semakin baik

Indeks Efektivitas Pemerintahan
semakin baik

1

Transformasi Rekrutmen
dan Jabatan ASN

2

Kemudahan Mobilitas
Talenta Nasional

5

Reformasi Pengelolaan
Kinerja dan
Kesejahteraan ASN

3

Percepatan Pengembangan
Kompetensi

4

Penataan Pegawai
Non-ASN

6

Digitalisasi Manajemen ASN

7

Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

**7 AGENDA
TRANSFORMASI
ASN**

Prioritas Presiden : Pembangunan SDM dan Reformasi Birokrasi

Peran dalam Manajemen ASN Nasional



Presiden

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN

Kementerian PANRB

- ❑ Perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian manajemen ASN
 - ❑ Kebijakan pengawasan system merit
- ❑ Mengoordinasikan rencana kerja lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN

Badan Kepegawaian Negara

Penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian atas **kebijakan teknis Manajemen ASN**, termasuk pelaksanaan penerapan Sistem Merit



Lembaga Administrasi Negara

Perumusan, penetapan, dan penyelenggaraan kebijakan teknis **pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN**



**Instansi Pemerintah
(K/L/Pemda)**

Melaksanakan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit

MANAJEMEN ASN berdasarkan PRINSIP MERITOKRASI

merupakan amanat UU
yang harus dijalankan
seluruh Instansi

“Manajemen ASN
diselenggarakan sesuai
dengan Prinsip
Meritokrasi”

(UU No 20 Tahun 2023)



Tindak lanjut yang perlu dilakukan Kepala Daerah dalam penerapan sistem merit dalam manajemen ASN

- 1 Rekrutmen ASN berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi
- 2 Pengembangan *talent pool*
- 3 Pembinaan pola karier
- 4 Penegakan disiplin
- 5 Penerapan Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi
- 6 Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan manajemen ASN
- 7 Peningkatan pengembangan kompetensi berbasis *experiential learning*
- 8 Pengisian Jabatan Strategis berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak dan integritas
- 9 Memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa

Kolaborasi Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam Manajemen ASN

Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

Memiliki kewenangan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah

Sekretaris Daerah sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB)

Melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

Melaksanakan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah

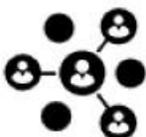
Memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian



Kepala Daerah baru perlu mendapatkan informasi yang holistik dari Sekda terkait kondisi tata Kelola ASN di daerahnya masing-masing



Kepala Daerah dan Sekda harus solid berkolaborasi dalam melakukan tata kelola manajemen ASN karena memiliki peran yang saling melengkapi



Kolaborasi Kepala Daerah dan Sekda dalam manajemen ASN dapat menjamin stabilitas pemerintahan di daerah, terutama pada masa awal pemerintahan

Status Kepegawaian dalam Manajemen ASN

Tidak ada kategori ASN lain selain PNS dan PPPK dalam peraturan perundang-undangan

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN **secara tetap** oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk **jangka waktu tertentu** dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan



4.755.614 PEGAWAI ASN

PNS

75%

3.589.707

PPPK

25%

1.165.907

Sebagian besar pegawai Pemerintah Daerah

Pusat
22%

Daerah
78%

Rekrutmen ASN perlu dikelola dengan baik karena UU HKPD telah membatasi **maksimal 30%** belanja pegawai **paling lama di TA 2027**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamankan pembatasan **proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen** dari total belanja APBD.



Paling lambat 5
Januari 2027

TAHUN ANGGARAN 2024



Rasio belanja pegawai
di atas 30%

37,18%

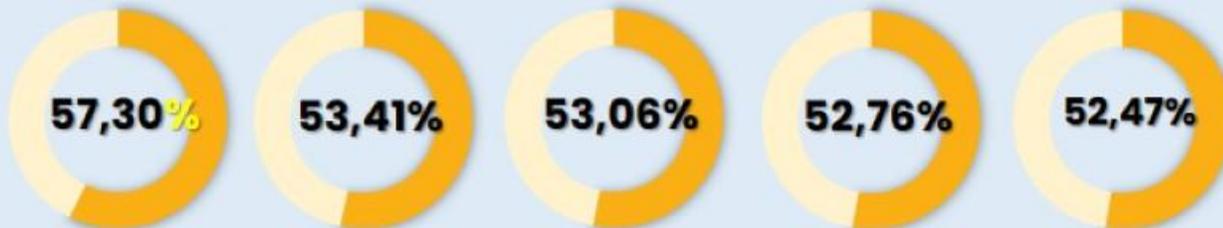
rata-rata nasional rasio
belanja pegawai
pada APBD

Harus berkurang
menjadi

<30% !

- ✓ Pemerintah Daerah wajib mengendalikan rekrutmen ASN secara proporsional agar belanja pegawai tidak melebihi batas
- ✓ Rekrutmen yang tidak terkendali akan mengurangi proporsi anggaran lain dan berdampak
- ✓ Tidak mengangkat jenis pegawai lain selain PNS dan PPPK
- ✓ Rekrutmen yang tidak terkendali akan berdampak pada **stabilitas pemerintahan daerah**

Top 5 Rasio Belanja Pegawai Pemda Terbesar





**Rekrutmen yang tidak
terkendali akan
berdampak pada stabilitas
pemerintahan daerah**



Larangan Mengangkat Pegawai non-ASN



Peraturan terkait Larangan Mengangkat Pegawai Non-ASN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Sanksi dapat berupa **disinsentif anggaran** maupun sanksi lain

BAB XIII LARANGAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





TINDAK LANJUT DAN PENUTUP

MENUJU MASA DEPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Future Governance (Governance 5.0)

Perubahan paradigma dari “Pemerintah mengatur masyarakat” menjadi “**Pemerintah bekerja bersama masyarakat**” / Masyarakat sebagai mitra
(a mindset shift: “from governing for citizens to governing with citizens”)



TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

ROADMAP REFORMASI BIROKASI

- **Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Daerah** yang selaras dengan RPJMD dan prioritas kepala daerah, serta mendukung Reformasi Birokrasi Tematik Nasional

MANAJEMEN ASN berbasis Meritokrasi

- **Melaksanakan manajemen ASN berbasis meritokrasi** (berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam seluruh tahapan)

LARANGAN MENGANGKAT NON-ASN

- **Melaksanakan amanat Pasal 65 UU No. 20 Tahun 2023 dengan tidak mengangkat pegawai non-ASN (honorar)** untuk menduduki Jabatan ASN, guna menjaga prinsip merit dan mengurangi beban anggaran

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- **Memastikan pelayanan publik yang mudah, murah, dan cepat** sesuai dengan kebutuhan rakyat

KOLABORASI bersama Sekda

- **Menyelaraskan komitmen / pemahaman** Kepala Daerah sebagai PPK dengan Sekretaris Daerah sebagai PyB untuk menjamin stabilitas dan tertib tata kelola pemerintahan khususnya dalam manajemen ASN



INFORMASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN PANRB "BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB"



Selasa

Hari SDM Aparatur



Muthia



081226888976



Rabu

Hari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas & Pengawasan



Qonita Silmi



081291162111



Kamis

Hari Pelayanan Publik

Hari Transformasi Digital Pemerintah



Dimas Mahardika



081226888976



Cahyono



0811831777



Jumat

Hari Kelembagaan & Tata Laksana



Bella



0895360281347





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH

 @kempnrb

 @kemenpanrb

 www .menpan.go.id

  @Kementerian PANRB

TUGAS

Dengan mencermati potret reformasi birokrasi di daerah saudara, yang dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi dan indikator pembangunan yang lain, bagaimana strategi saudara dalam melaksanakan reformasi birokrasi ke depan?

